

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab II dan Bab III, penelitian ini menunjukkan bahwa Euroskeptisisme Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán dapat dikategorikan sebagai *soft euroscepticism* dalam tipologi Taggart & Szczerbiak (2002). Hungaria tidak menolak keanggotaan UE secara keseluruhan yang terbukti melalui keputusannya untuk tetap bertahan sebagai anggota UE dan terus menerima manfaat finansial keanggotaan. Selanjutnya, sikap Euroskeptis tersebut telah menghasilkan implikasi yang nyata terhadap dimensi hubungan keanggotaannya pada UE. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi tersebut muncul dalam bentuk pelemahan secara bertahap terhadap fondasi-fondasi yang menjadi syarat keberlangsungan integrasi kawasan Eropa.

Implikasi tersebut termanifestasi melalui empat dimensi *spillback* dalam kerangka teori neofungsionalisme yang saling memperkuat. Pertama, dalam dimensi interdependensi dan konvergensi ekonomi, kebijakan ekonomi nasionalis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orbán telah melemahkan komitmen Hungaria terhadap logika pasar tunggal UE. Resistensi terhadap *Energy Union* yang berjalan secara bersamaan dengan penguatan ketergantungan energi bilateral pada Rusia semakin mempertegas bahwa orientasi kebijakan ekonomi Hungaria bergerak menjauh dari logika interdependensi intra-UE yang diasumsikan oleh kerangka neofungsionalisme. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana konvergensi ekonomi Hungaria yang terus meningkat, sementara kualitas tata

kelola demokrasi justru menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari keanggotaan UE tidak secara otomatis menghasilkan pendalaman komitmen terhadap nilai-nilai dan mekanisme supranasional.

Kedua, dalam dimensi legitimasi publik dan politisasi integrasi, Euroskeptisisme Hungaria dilakukan sebagai sebuah proyek politik yang bersifat *top-down* dan tidak bersumber dari sentimen anti-UE yang organik di kalangan masyarakat Hungaria. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik Hungaria terhadap UE masih relatif bertahan, hal tersebut menunjukkan bahwa *spillback* dalam dimensi ini dilakukan melalui penciptaan jarak antara narasi pemerintah dan nilai-nilai integrasi yang dalam jangka panjang berpotensi memperlemah legitimasi lembaga supranasional di Hungaria.

Ketiga, dalam dimensi kepatuhan hukum dan otoritas supranasional, pola ketidakpatuhan Hungaria terhadap hukum UE menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2010. Kepatuhan parsial Hungaria terhadap kebijakan, regulasi dan rekomendasi UE meskipun menjadi salah satu penerima dana UE terbesar mencerminkan kondisi di mana hubungan keanggotaan tidak lagi beroperasi berdasarkan logika manfaat bersama, tetapi lebih pada perhitungan selektif yang mengoptimalkan manfaat sekaligus mengurangi kewajiban negara.

Keempat, dalam dimensi respons terhadap kebijakan bersama dalam situasi krisis, analisis terhadap tiga krisis utama memperlihatkan pola peningkatan unilateralisme oleh Hungaria secara konsisten. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap krisis yang seharusnya menjadi pendorong untuk memperdalam integrasi justru dimanfaatkan oleh pemerintahan Orbán sebagai

momentum untuk menegaskan kedaulatan nasional Hungaria dan memperlemah kapasitas respons kolektif UE.

Keempat dimensi *spillback* yang saling memperkuat tersebut menghasilkan implikasi nyata terhadap dimensi hubungan keanggotaan Hungaria pada UE. Hal ini tercermin melalui respons dari UE, yaitu eskalasi *infringement proceedings* lintas sektor, pembekuan total dana senilai 32 miliar euro atau sekitar 16% PDB Hungaria, hingga puncaknya yaitu aktivasi mekanisme Article 7(1) TEU pada September 2018 yang merupakan mekanisme paling ekstrem dalam kerangka hukum keanggota UE.

Implikasi terhadap hubungan keanggotaan Hungaria terlihat melalui pelemahan integrasi yang termanifestasi dalam orientasi kebijakan yang selektif, di mana Hungaria secara konsisten memilih jalur alternatif di luar kerangka supranasional ketika UE dianggap gagal menjalankan fungsinya secara memadai. Melalui lensa pragmatis, masyarakat Hungaria merasa bahwa fungsi-fungsi integrasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mulai dari kemakmuran ekonomi yang dirasa tidak merata, dominasi perusahaan asing di berbagai sektor strategis, hingga mekanisme solidaritas yang dianggap tidak memperhitungkan kondisi spesifik dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Terkait kebijakan dalam dimensi energi, posisi geografis dan ketergantungan infrastruktur Hungaria pada jaringan pipa Druzhba menjadikan kepatuhan penuh terhadap mekanisme milik UE dipandang lebih merugikan kepentingan nasionalnya. Selanjutnya, kelemahan struktural UE yang tidak mampu

mengakomodasi negara anggota seperti Hungaria turut menjadi penyebab mengapa *spillback* terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Euroskepstisisme Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán merepresentasikan sebuah proses *spillback* yang secara aktif melemahkan hubungan keanggotaan Hungaria dengan UE sebagai entitas supranasional. Pelemahan integrasi ini bukan dalam bentuk keluarnya Hungaria secara formal dari dalam keanggotaan, melainkan bagaimana Hungaria berjalan dengan logika selektif yang memaksimalkan manfaat keanggotaan sambil secara selektif menolak kewajiban supranasional yang dianggap tidak menguntungkan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pemangku kebijakan maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini, para pemangku kebijakan UE disarankan dapat mengevaluasi dan memperkuat mekanisme kondisionalitas *rule of law* yang menjadi instrumen efektif dalam merespons pola *spillback* Hungaria. Kasus Hungaria sendiri menunjukkan bahwa mekanisme politik seperti Article 7 TEU memiliki keterbatasan karena membutuhkan konsensus bulat yang sulit dicapai, sementara mekanisme finansial seperti pembekuan dana kohesi terbukti lebih efektif dalam mendorong respons. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kondisionalitas sebagai respons terkait kepatuhan terhadap nilai-nilai fundamental UE perlu menjadi prioritas dalam reformasi kelembagaan UE ke depannya. Selanjutnya, disarankan agar pemangku kebijakan

UE lebih memperhatikan dimensi komunikasi publik dalam negara-negara anggota yang mengalami politisasi integrasi *top-down* untuk memperkuat saluran komunikasi langsung antara institusi UE dan warga Hungaria di luar narasi yang dibangun pemerintah.

Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, di mana analisis dalam penelitian ini berfokus pada kasus tunggal Hungaria sehingga temuan-temuannya belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung ke kasus Euroskeptisisme di negara anggota UE lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji perbandingan antara kasus Hungaria dengan negara anggota UE lain yang juga menunjukkan kecenderungan euroskeptis. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi aplikasi kerangka teori neofungsionalisme sebagai teori disintegrasi terhadap kasus-kasus Euroskeptisisme di kawasan Eropa secara lebih mendalam.